

Jakarta, 31 Agustus 2018

Nomor : 068/MTI/CORSEC/EXT/VIII/2018  
Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Perihal : Bukti Pengumuman Koran Perubahan Susunan Anggota Direksi PT Mora Telematika Indonesia dan Entitas Anak Usaha

Kepada Yth. :

**PT. Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building

Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

**U.p: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3**

*Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut "POJK 33"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31"); Peraturan PT Bursa Efek Surabaya Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten (untuk selanjutnya disebut "IDX IA3"); dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 65, tertanggal 25 September 2017, antara PT. Mora Telematika Indonesia ("Perseroan") dengan PT. Bank Mega Tbk. ("Wali Amanat") yang telah di ubah melalui Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017, nomor 38, tertanggal 18 oktober 2017, keseluruhnya dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, dimana perubahan terakhir melalui Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017, nomor 56, tertanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Dina Chozie, SH., Notaris Pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut "PWA");*

Dengan hormat,

Berdasarkan POJK 33, POJK 31, IDX IA3 dan PWA, melalui surat ini kami sampaikan bukti pengumuman koran perihal perubahan susunan anggota direksi Perseroan dan Entitas Anak Usaha sebagaimana diumumkan dalam Koran Bisnis Indonesia tertanggal 31 Agustus 2018 halaman 26.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, mohon dapat menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078–[henry.rumopa@moratelindo.co.id](mailto:henry.rumopa@moratelindo.co.id) atau [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT Mora Telematika Indonesia,**



**Moratelindo**  
PT. Mora Telematika Indonesia

**Henry Rizard Rumopa**  
Sekretaris Perusahaan

**Tembusan :**

1. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.

PROGRAM RITEL MODERN



Calon pembeli mendapat penjelasan tentang produk yang dikutuskan dalam Program Harga Teman yang diluncurkan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/8). Program Harga Teman merupakan program terbaru dari supermarket Giant sebagai upaya memberikan harga murah kepada pelanggannya dan stabilisasi harga produk yang dibutuhkan masyarakat.

BAJA NIRKARAT

RI Bebas Tarif dari AS

JAKARTA — Produk baja nirkarat (stainless steel) Indonesia terbebas dari pengenaan bea masuk sebesar 25% oleh Pemerintah Amerika Serikat, meskipun hanya berlaku selama 1 tahun.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradyatni mengatakan, keputusan tersebut dikeluarkan oleh Washington pada 2 Agustus 2018.

"Keputusan ini menjadi kabar baik bagi Indonesia, setelah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berkunjung ke AS pada Juli. Segera keputusan ini menjadi awal yang baik bagi produk-produk Indonesia yang diekspor ke AS selanjutnya," katanya, Kamis (30/8).

Menurutnya, keputusan tersebut diperoleh Indonesia setelah mendapatkan dua surat pembentahan dari Bureau of Industry and Security (BIS) AS. Dalam surat itu, produk baja nirkarat asal RI mendapatkan pengecualian bea masuk selama 1 tahun.

Pradya mengatakan, keputusan tersebut diambil atas permintaan dari perusahaan domestik AS, yakni AAP Metals, LLC DBA Arbor Metals. Korporasi tersebut melayangkan dua kali permintaan kuota impor baja nirkarat sebesar 100.000 kg dan 135.000 kg.

Selain itu, keputusan tersebut di sebabkan oleh terbatasnya kapasitas produksi baja nirkarat di AS. Di sisi lain, BIS menilai, tidak menemukan

adanya ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan nasional ketika impor produk tersebut dibebaskan sementara waktu.

Ketua Cluster Flat Product Asosiasi Besi dan Baja Indonesia Purwono Widodo mengapresiasi kebijakan AS tersebut. Kendati hanya bersifat temporer, dia memproteskan pembatasan bea masuk tersebut akan menjadi insentif ekspor produk besi dan baja lain asal Indonesia.

"Kebijakan ini menjadi indikasi bahwa ekspor stainless steel kita mulai bisa berekspansi ke depannya," katanya.

Kendati demikian, dia menilai pembatasan bea masuk baja nirkarat ke AS belum akan berdampak banyak bagi bisnis besi dan baja RI secara keseluruhan. Pasalnya, ekspor baja karbon yang berjenis hot rolled coil (HRC) dan plate masih dikenai tarif antidumping oleh AS sebesar 47%.

Untuk itu, menurutnya, para pelaku bisnis besi dan baja nasional akan terus memacu ekspor produk hilir seperti pipa baja. Sebab, komoditas tersebut memiliki potensi pasar yang besar dan tidak dikenai bea masuk oleh AS.

Purwono berharap, produk besi dan baja Indonesia mendapatkan insentif tambahan dari AS. Pasalnya, produk baja dan aluminium Indonesia akan menjadi substitusi yang tepat bagi AS, ketika impor dari China dibatasi. (Yustinus Andri)

TRANSAKSI DAGANG-EL

Impor 'Terselubung' Merajalela

JAKARTA — Pesatnya pertumbuhan industri perdagangan elektronik ditengarai menjadi pelatuk ledakan impor barang konsumsi di Indonesia.

Yustinus Andri yustinus.andri@bisnis.com

Ekonim Institute for Development of Economics and Finance Berly Martawadya menjelaskan, lonjakan impor barang konsumsi melalui platform dagang-el diperparah dengan fakta bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) hingga saat ini belum dapat mencatat transaksi barang dan jasa yang terjadi via toko daring.

"Ada indikasi, terdapat korelasi antara kenaikan impor barang konsumsi dengan kenaikan tren belanja di portal dagang-el, terutama untuk barang konsumsi," katanya, Kamis (30/8).

Menurutnya, impor barang konsumsi via dagang-el yang tidak tercatat di BPS tersebut terindikasi menjadi salah satu penyebab kian melebarnya defisit transaksi berjalan, yang pada kuartal II/2018 menyedot US\$ miliar atau 3% dari produk domestik bruto (PDB). Untuk itu, dia mendukung rencana kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk impor dan bea masuk terhadap impor barang kiriman. Melalui cara itu, pemerintah diharapkan bisa mengendalikannya impor dagang-el melalui bea cukai.

Berdasarkan Riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap 3 marketplace di Indonesia, terbukti bahwa produk impor mendominasi barang-barang yang dijual secara daring. (Lihat grafis)

Pakaian adalah jenis barang yang paling diminati oleh konsumen dengan persentase mencapai 73% terhadap total transaksi dagang-el. Adapun, produk kosmetika dan obat serta barang elektronik masing-masing sebesar 27,50% dan 26,30%.

Analisis dagang-el Amir Karimuddin berpendapat, literasi pengguna Indonesia—khususnya dari sektor usia muda—kini kecil menengah (UMKM)—terhadap pemanfaatan platform dagang-el masih rendah.

Akibatnya, peran pasar dagang-el lebih banyak diisi oleh produk impor, terutama jika

platform tersebut dimiliki oleh investor asing. Dia pun memperkirakan, dominasi produk impor melalui dagang-el akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Apalagi, tegasnya, situasi itu didukung oleh tren masyarakat Indonesia yang mengalihkan kebiasaan berbelanja dari luring menjadi daring.

"Ke depan, jika tidak ada penetrasi yang lebih kuat dari produk dalam negeri ke platform dagang-el, bukan tidak mungkin impor produk konsumsi akan semakin mendominasi, seiring dengan naiknya jumlah pengguna transaksi dagang-el yang dibarengi dengan peningkatan peran produk lokal di platform tersebut," ujarnya.

Proyeksi Amir didasarkan dari data Bappenas, yang memperkirakan pengguna dagang-el akan meningkat menjadi 44 juta orang pada 2022, dari saat ini sejumlah 38 juta orang.

Amir mengemukakan, impor melalui dagang-el juga akan memperparah tekanan terhadap cadangan devisa Indonesia. Pasalnya, transaksi impor dagang-el menggunakan dolar AS sebelum dibayarkan ke rupiah ketika barang masuk ke Tanah Air.

Dia menyebutkan, pendapatan melalui nilai transaksi perusahaan-perusahaan dagang-el di Indonesia diprediksi menembus US\$16 miliar pada 2022.

HANYA PERALIHAN

Di lain pihak, Ketua Dewan Pembina Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) Daniel Tumiwa menampik tuduhan bahwa jebanya impor barang konsumsi disumbang oleh sektor dagang-el.

"Produk yang dijual di dagang-el itu mayoritas berasal dari produk yang sebelumnya dijual melalui medium luring. Berpindah medium istilahnya. Jadi, tidak ada perubahan posisi barang yang dijual secara signifikan," katanya.

Kendati demikian, dia mengakui, sebagian platform dagang-el memberi fasilitas kemudahan pembelian barang konsumsi langsung dari luar negeri. Fasilitas itu relatif diminati oleh konsumen lantaran lebih murah dibandingkan dengan membeli produk asing di dalam negeri yang diimpor dalam jumlah besar.

"Namun, [peminat] fasilitas itu masih kecil. Makanya kami tidak adanya pengenaan PPh an impor barang konsumsi atau pengenaan bea masuk barang kiriman. Sebab, selama ini pembeli ceeran produk luar negeri

Impor dalam Dagang-El

Pakaian dan barang elektronik merupakan produk yang paling digemari saat belanja daring. Namun, sebagian besar barang yang dijual di pasar perdagangan elektronik merupakan barang impor.

Hasil pencarian Bappenas dalam situs dagang-el untuk merek lokal dan impor menunjukkan:



memanfaatkan kebijakan de minimus."

Dia pun mendukung rencana mandatori bagi pelaku dagang-el untuk menjual produk dalam negeri sejumlah lebih dari 80%, guna mencegah banjir produk impor pada perusahaan dagang-el yang beroperasi di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Hilir dan Penyebar Pusat Belanja Handaka Santosa berpendapat, selama ini pelaku dagang-el diuntungkan dengan 15% per tahun. Hal tersebut akan tetap terjadi ketika produk yang masuk tidak dari pemerintah. Kami hanya ingin kepastian dalam perlakuan.

Kalau kondisi seperti saat ini, kami tentu harus bekerja lebih keras dibandingkan dengan mereka [pelaku dagang-el].

Handaka mengatakan, para peritel luring diharuskan patuh membayar pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dan PPh final 10% dari sewa kepemilikan mall. Saat menampung, mereka juga harus memenuhi syarat standar nasional Indonesia (SNI).

"Coba bandingkan dengan yang dagang-el, ketentuannya bagaimana?" tegasnya. Untuk itu, dia meminta pemerintah menegakkan PPh an yang sama antara peritel daring dan luring. Terlebih, saat ini, para pelaku dagang-el telah diberikan insentif berupa

fasilitas plus logistik berbasis (PLB) khusus e-commerce.

Seperti diketahui, insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.28/2018. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Yulki Nugrahanan Hanafi menilai, kebebasan beleid yang mengatur PLB bagi barang-barang dagang-el berpotensi memperbesar impor.

Dia mempredikasikan, kebijakan itu akan mendorong kenaikan ekspor melalui dagang-el sebesar 15% per tahun. Hal tersebut akan tetap terjadi ketika produk yang masuk tidak dari pemerintah. Kami hanya ingin kepastian dalam perlakuan.

Pasalnya, fasilitas itu akan memberi insentif kepada pedagang raksasa dari luar negeri seperti Alibaba dan Amazon seperti dadakan stock point mereka ke PLB di Indonesia. Menurutnya, apabila kedua raksasa tersebut telah menguasai PLB di Indonesia, mereka akan cenderung melanjutkan dengan membangun rantai distribusi dan logistik sendiri.

"Distribusi akan mereka tangani sendiri, karena kondisi dalam negeri memang relatif mudah. Namun, ketika mereka membangun rantai distribusi sendiri, mereka akan lebih mudah penetrasi ke Indonesia. Padahal produk mereka dipastikan rata-rata diimpor," jelasnya. □

**Monatelindo**  
PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Mora Telematika Indonesia, berdasarkan keputusan yang dibuat berdasarkan rangkaian hasil Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahunkan sebelumnya dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara yang demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Sesuai dengan ketentuan tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2018, telah disetujui dan ditandatangani resolusi (keputusan) yang diadakan kepada para pemegang saham Perseroan di luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Para Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:
  - Menyetujui pengunduran diri Wakil Direktur Utama Perseroan atas nama Tuan Yoppe Widjaja, karenanya dengan ini memberlakukan dengan hormat yang bersangkutan dengan memberikan pembebasan tanggung jawab atas tugas-tugas yang telah dilaksanakan selama ini (except et d'orange) sepanjang tercemeri pada laporan keuangan Perseroan.
  - Mengangkat Tuan Jimmy Kadir, yang sebelumnya merupakan Direktur Perseroan, menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan, tanpa prosedur pengumuman dan pengumuman di dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 

Direktur Utama	: Galumbang Menak
Wakil Direktur Utama	: Jimmy Kadir
- Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk mengadakan pejabat yang berwenang termasuk hadir dihadapan Notaris dan untuk membuat atau menyebabkan dibuatnya dan/atau menyatakan seluruh atau sebagian dan Keputusan ini menjadi keputusan Pemegang Saham dalam bentuk akta notaris untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari atau memberitahukan kepada atau mendistribusikan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengubah atau menandatangani dalam anggaran dasar apabila dianggap perlu, dan/atau disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menandatangani akta-akta, menyimpulkan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, untuk hadir dihadapan notaris dan badan pemerintah yang terkait untuk melakukan seluruh permohonan atau pendaftaran yang diperlukan sebagaimana diperijayatkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan untuk mengambil dan melakukan setiap dan seluruh tindakan lain atau untuk melakukan tindakan lain apapun juga yang diperlukan atau seharusnya diperlukan atau dianggap perlu, dalam pelaksanaan Keputusan tersebut, tanpa ada yang dibatasi.
- Meyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan jo. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal terakir ditandatanganinya Keputusan ini.

Jakarta, 31 Agustus 2018  
PT. Mora Telematika Indonesia  
Direksi

Impor barang konsumsi melalui dagang-el bisa memperburuk CAD dan menekan cadangan devisa.

PLB dagang-el berisiko meningkatkan impor barang sebesar 15% per tahun.

BISNIS RITEL MODERN

Pemain Hypermarket Tunda Ekspansi

TANGERANG SELATAN — Para pelaku bisnis hypermarket tengah menunda ekspansi, akibat iklim usaha yang masih sulit di sektor tersebut.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Sodalih menjelaskan, peritel segmen hypermarket masih terkendala 3 hal untuk bisa ekspansi usaha pada 2018. Pertama, besarnya modal yang diperlukan untuk membuka gerai baru.

Kedua, sulitnya mendapatkan izin pembukaan gerai baru. Ketiga, perubahan pola belanja akibat persaingan dengan pemain perdagangan elektronik.

"Ya, [bisnis hypermarket] kurang menguntungkan, karena banyak kesulitan yang dihadapi pelaku bisnis ini," jelasnya saat dihubungi, Kamis (30/8).

General Manager Corporate Affairs PT Hero Supermarket Tbk. (Giant) Tony Maim-pung membe-

nyala lebih memilih untuk optimalisasi gerai yang sudah ada.

Saat ini, jumlah gerai Giant—yang terdiri atas Giant Ekstra dan Giant Ekspres—mencapai 158 unit, turun dari 169 unit pada 2016 dan 166 unit pada tahun lalu.

"Permasalahan yang dialami Giant adalah ketatnya persaingan bisnis ritel. Kami tidak hanya bersaing dengan sesama pemain hypermarket, tetapi juga dengan supermarket dan minimarket," sebutnya.

Selain itu, Giant kerap menemukan kendala perizinan ketika hendak membuka gerai baru, khususnya di daerah. Permasalahan lain adalah sulitnya menyerap produk UMKM yang belum memiliki izin edar, meski telah berkualitas ekspor.

Dengan demikian, ujar Tony, tahun ini Giant memilih untuk fokus pada perbaikan internal, termasuk pergantian tata kelola. Program itu mengedepankan optimalisasi kunjungan dan pendapatan dari gerai-gerai existing.

Bagaimanapun, dia optimis kinerja Giant akan terjaga hingga akhir tahun ini. Giant memilih untuk fokus pada perbaikan internal, termasuk pergantian tata kelola. Program itu mengedepankan optimalisasi kunjungan dan pendapatan dari gerai-gerai existing.

Bagaimanapun, dia optimis kinerja Giant akan terjaga hingga akhir tahun ini. Giant memilih untuk fokus pada perbaikan internal, termasuk pergantian tata kelola. Program itu mengedepankan optimalisasi kunjungan dan pendapatan dari gerai-gerai existing.

fokus pada efisiensi pengelolaan gerai existing, tanpa mengenyampingkan promosi untuk menarik pengunjung.

Jumlah gerai Hypermarket saat ini adalah 118 unit, turun tipis dari 2017 yang mencapai 119 unit, tetapi lebih tinggi dari 2016 yang hanya 112 unit.

Dari perspektif lain, General Manager Corporate Communication Transmart Carrefour Sutris Hamid Ahmadi menegaskan, perusahaan itu justru agresif dalam mengadakan ekspansi bisnis.

"Kami juga sebaliknya, kami melawansu arus di tengah kondisi sulit yang terjadi dalam iklim bisnis hypermarket," katanya.

Korporasinya mencoba menarik pengunjung lebih banyak dengan konsep hybrid market, yang memadukan hypermarket dengan toko serba ada (toserba).

"Ini konsep 4 in 1, yaitu berbelanja, bersantai, bermain dan bioskop. Jadi, kami melakukan remodeling Carrefour."

Gerai Transmart Carrefour tumbuh signifikan, dari 7 unit pada 2016 menjadi 19 unit pada 2017, dan 26 unit per Agustus 2018. Hingga akhir 2018, Transmart Carrefour telah menyiapkan rencana ekspansi untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur.

President Direktur Dunia Industri (lembaga penelitian independen) Andryanto Suwiso berpendapat, pebisnis hypermarket harus mengevaluasi target pasarnya, karena segmentasinya terlalu luas.

Dengan demikian, penetrasi minimarket dan dagang-el dengan modal menengah cukupan pasar hypermarket. "Mereka harus retargeting segmentasi pasarnya," ujarnya. (M. Richard)

**Monatelindo**  
PENGUMUMAN KETERBUKAAN INFORMASI PERUBAHAN DIREKSI PERSEROAN

Direksi PT Mora Telematika Indonesia berdasarkan keputusan yang dibuat berdasarkan rangkaian hasil Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, OMI dan PRB yang selanjutnya ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2018, telah memutuskan perubahan susunan direksi sebagai berikut:

PT. OXYGEN INFRASTRUKTUR INDONESIA	PT. OXYGEN MULTIMEDIA INDONESIA	PT. PALAPA RING BARAT
<b>Sebelumnya menjabat</b> Direktur Utama : Tn. Galumbang Menak Wakil Direktur Utama : Tn. Yoppe Widjaja Direksi : Tn. Jimmy Kadir	<b>Sebelumnya menjabat</b> Direktur Utama : Tn. Galumbang Menak Wakil Direktur Utama : Tn. Yoppe Widjaja Direksi : Tn. Jimmy Kadir	<b>Sebelumnya menjabat</b> Direktur Utama : Tn. Spanti Lumintang Direktur : Tn. Yoppe Widjaja Direksi : Tn. Jimmy Kadir
<b>Setelah Perubahan</b> Direktur Utama : Tn. Galumbang Menak Wakil Direktur Utama : Tn. Jimmy Kadir	<b>Setelah Perubahan</b> Direktur Utama : Tn. Galumbang Menak Wakil Direktur Utama : Tn. Jimmy Kadir	<b>Setelah Perubahan</b> Direktur Utama : Tn. Spanti Lumintang Wakil Direktur Utama : Tn. Jimmy Kadir

Untuk maksud perubahan susunan Direksi OMI, OMI dan PRB tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang dipertijayatkan anggaran dasar maupun perjanjian-perjanjian dimana OMI, OMI dan PRB menjadi pihak di dalamnya.

Informasi ini diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK/04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Elemen Emiten atau Perusahaan Publik.

Jakarta, 31 Agustus 2018  
PT Mora Telematika Indonesia  
Direksi